

perkembangan ilmu sosial

by Akhmad Asyari

Submission date: 04-Apr-2023 01:57PM (UTC+0800)

Submission ID: 2055404298

File name: 3_Perkembangan_Ilmu_Sosial_di_Era_Milenial.pdf (791.83K)

Word count: 13525

Character count: 89674

**PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL
DI ERA MILENIAL**



Halaman Sengaja Dikosongkan

Aref Irawan, Adrian Maulana, Abdul Majid & Sahman Hadi

**PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL
DI ERA MILENIAL**


Sanabil

Aref Irawan, Adrian Maulana, Abdul Majid & Sahman Hadi ~ iii

Perkembangan Ilmu Sosial di Era Milenial

© Sanabil 2021

Penulis: Aref Irawan, Adrian Maulana, Abdul Majid & Sahman Hadi

Editor: Dr. Akhmad Asyari, M. Pd

Layout: Erwin Padli, M. Hum

Desain Cover: Sanabil Creative

9 *ll rights reserved*

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN: 978-623-317-152-6

Cetakan 1: Agustus 2021

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
KATA PENGANTAR DEKAN.....	ix
PRAKATA PENULIS.....	xi

BAB I KONSEP DASAR ILMU SOSIAL

A. Pengertian ilmu sosial.....	1
B. Karakteristik dan Ciri Ilmu Sosial	1
C. Tujuan dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial	2
D. Penerapan Ilmu-Ilmu Sosial di Berbagai Bidang	3
E. Konsep-Konsep Ilmu Sosial	5
F. Hubungan IPS Dengan Ilmu-Ilmu Sosial	5

BAB II PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL

PADA ADAB KE-19

A. Perkembangan Ilmu Psikologi dan Sosiologi	14
B. Tahap Perkembangan Ilmu Sosial	19

BAB III PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL

DI TIAP NEGARA PASCA PERANG DUNIA II

A. Perkembangan ilmu sosial di Asia	24
B. Perkembangan ilmu sosial di Eropa	24
C. Perkembangan ilmu sosial di Timur Tengah	27

BAB IV PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL DI

TIAP NEGARA PADA TAHUN 1960-1980

A. Perubahan ilmu sosial di Asia	33
B. Perubahan ilmu sosial di Eropa	36
C. Perubahan ilmu sosial di Timur Tengah	37

**BAB V PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL
DI INDONESIA**

- A. Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia .. 41
- B. Fase-Fase Perkembangan Ilmu Sosial
di Indonesia 43

**BAB VI PENGARUH MODERNISASI
TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL**

- A. Modernisasi dan Globalisasi..... 46
- B. Perubahan Sosial..... 50
- C. Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial 53

DAFTAR PUSTAKA 57

BIODATA PENULIS 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Konsep-konsep ilmu social ~5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Auguste Comte (1798-1857)	17
Gambar 1.2. Herbert Spencer (1820-1903).....	18
Gambar 1.3. Vilfredo Pareto (1848-1923).....	19
Gambar 1.4. Contoh perubahan social	50
Gambar 1.5. Modernisasi.....	54

KATA PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, kompetensi penulisan buku mahasiswa pada tahun 2021.

Kompetisi Buku Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya fakultas berkontribusi dalam implementasi meningkatkan literasi mahasiswa, dimana kuantitatif, grafik riset dan publikasi mahasiswa PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan mutu mahasiswa dengan mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, efisien dengan kemudahan akses sumber belajar bagi mahasiswa. Publikasi ini juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dalam konteks memberi kontribusi dalam meningkatkan nilai akreditasi masing-masing program studi di Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram.

Kompetisi penulisan buku mahasiswa tahun 2021 berjumlah 20 judul dan berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutic, fenomenologi dan juga dengan ilmu eksakta (natural sciences) yang berkarakter induktif-rasional.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya dengan diadakannya kembali kompetisi penulisan buku mahasiswa FTK UIN Mataram pada tahun 2021. Tak ada gading yang tak retak; tentu ada masih kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan pada petunjuk teknis

(pedoman) penulisan buku referensi ini. Di ‘ruang’ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan dihadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.

Mataram, 31 Agustus 2021 M

Dekan



Dr. Hj. Lubna, M.Pd.

NIP. 196812311993032008

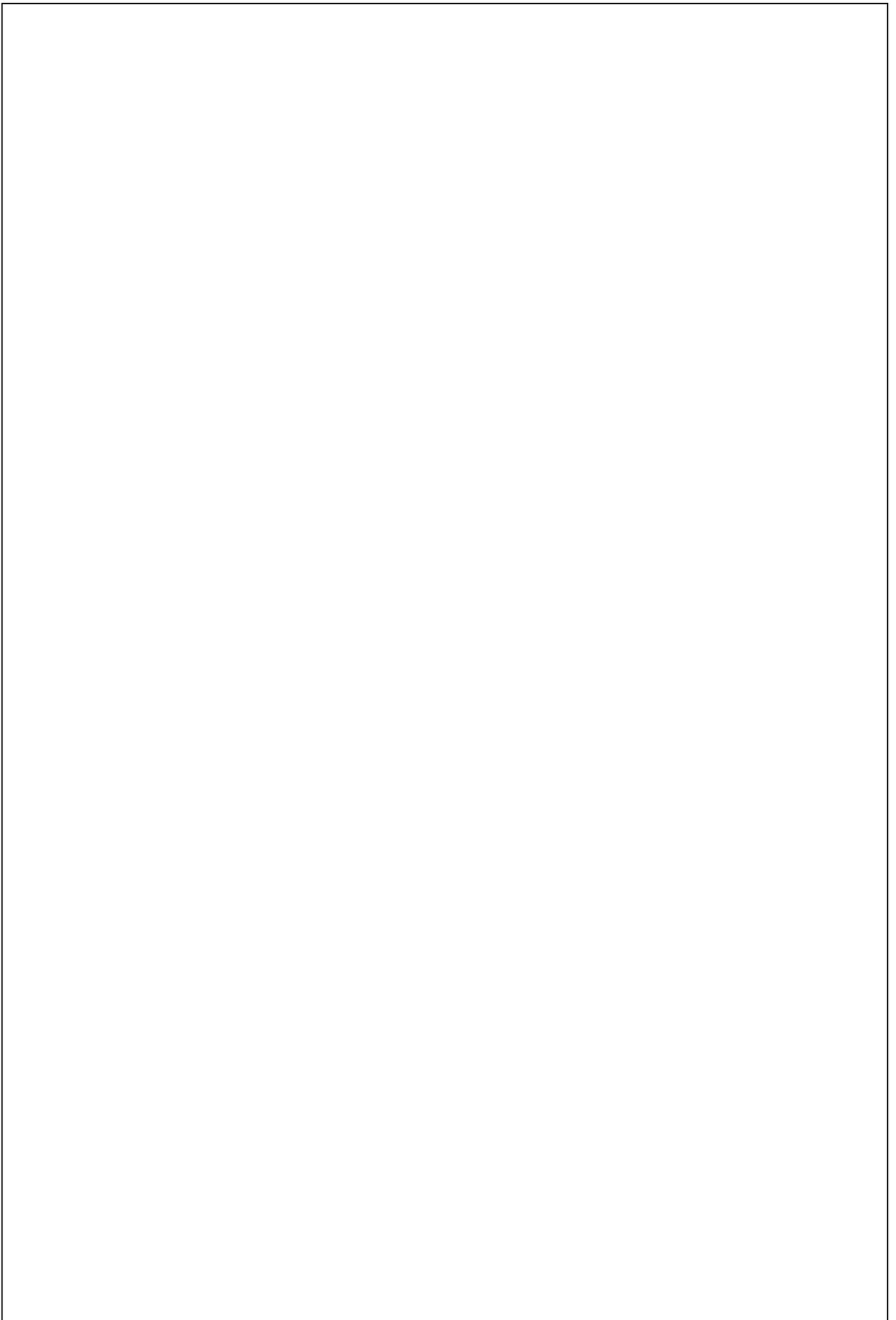
PRAKATA PENULIS

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan buku ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW karena melalui beliau penulis bisa menikmati nikmatnya menuntut ilmu.

Buku ini adalah buku yang membahas tentang perkembangan ilmu sosial di Era Milenial. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga dan teman-teman yang telah berjasa dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan buku ini. Krtitik dan saran sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki kualitas buku ini.

Mataram, Agustus 2021

Penulis



BAB I

KONSEP DASAR ILMU SOSIAL

A. Pengertian Ilmu Sosial

Ilmu Sosial adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial, khususnya yang ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan pengertian-pengertian (fakta, konsep, dan teori) yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosial, sosiologi, antropologi, psikologi sosial. Pengertian ilmu sosial menurut para ahli:

1. Menurut Norman MazKenzie ilmu-ilmu sosial (social sciences) dapat diartikan sebagai semua bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat.
2. Menurut Astawa (2017: 23-25), ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.
3. Menurut Nursid Sumaatmadja, menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok.

B. Karakteristik dan Ciri Ilmu Sosial

Numan Somantri mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut:

1. Berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah
2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya.
3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental ide.

4. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan syntactis yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (observasi dan eksperimen).
5. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik.

Dufty mengemukakan bahwa ilmu sosial paling tidak memiliki empat ciri sebagai berikut:

1. Merupakan pengetahuan yang terorganisir yang mengkaji hubungan-hubungan antar manusia.
2. Pengetahuan yang terorganisir tersebut adalah pengetahuan valid dan dapat diteliti, dalam arti terbuka untuk dikaji ulang dengan metode yang sama.
3. Teori dan konsep pengetahuan tersebut diperoleh dari kajian ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu.
4. Muara dari penelitian dapat digeneralisasikan untuk mendapatkan teori, konsep, hukum, maupun dalil dalam pengetahuan sosial.
5. Pengkajian yang dilakukan berkisar antara hakikat nilai, hakikat realitas sosial, dan hakikat kemajuan pengetahuan.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial

Tujuan pembelajaran ilmu sosial antara lain; Memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat; Peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulangnya; Menyadari setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya mendekatinya mempelajarinya secara kritis dan interdisipliner; dan Memahami jalan pikiran para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan lain dan

dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup ilmu sosial adalah; Kenyataan-kenyataan sosial (Realitas Sosial) yang ada dalam masyarakat yang secara merupakan masalah sosial tertentu. bersama-sama; Konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenyataan-kenyataan sosial dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang dibahas dalam Ilmu Pengetahuan Sosial; dan Masalah-masalah timbul masyarakat, biasanya terlibat dalam berbagai dengan yang lainnya berbeda yang dalam kenyataan-kenyataan sosial yang antara yang satu

D. Penerapan Ilmu-Ilmu Sosial di Berbagai Bidang

Penerapan IIS secara komprehensif dapat disaksikan diberbagai bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Para pendidik/guru sekolah memakai IIS dalam rangka melaksanakan transmisi budayawi demi kelestarian peradaban. Misalnya psikologi (ilmu kejiwaan) untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Demikian juga pengenalan siswa kepada masyarakatnya, lingkungan alamnya, pengembangan mental dan emosional menggunakan berbagai materi dari aneka IIS.

2. Bidang Pelayanan Sosial (Social Work)

Para pelayan sosial yang dididik di sekolah atau akademi, diberi perlengkapan pengetahuan yang diambilkan dari ilmu biologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Adapun rincian usaha mereka meliputi:

- a. Pengembangan, pemeliharaan, dan perbaikan efisiensi di bidang fisik, mental dan sosial.
- b. Pencegahan berkurangnya efisiensi sosial.
- c. Peningkatan adaptasi individu dan kelompok kepada tata sosial yang ada.

d. Penyajian, pemeliharaan kondisi hidup sosial yang manusiawi.

3. Bidang Psikiatri Sosial

Ini merupakan pelayanan khusus untuk mengerti disorganisasi sosial dan mencegah terjadinya, atau jika telah terjadi, untuk meringankan derita manusia sebagai akibatnya. Para individu umumnya menderita disorganisasi sosial karena tawaran kultural berkonflik dengan kebutuhan jasmaninya. Akibatnya adalah gejala neurose, kejahatan, revolusi sampai perang. Jika yang dipersoalkan adalah disorganisasi pribadi, maka itulah yang disebut krisis kultural, atau fakta bahwa budaya dari individu berkonflik dengan dirinya sendiri.

4. Bidang Kepemimpinan Politik dan Pemerintahan

Dalam segala nivo pemerintah, kebijaksanaannya menggunakan hasil-hasil berbagai ilmu sosial seperti: politikologi, sosiologi, ekonomi, psikologi. Ahli-ahli dari berbagai bidang itu dapat diangkat menjadi penasihat bagi pemerintah, misalnya dalam menangani pembangunan daerah. Makin demokratis situasi sosial makin banyak sarjana ilmu sosial dimanfaatkan.

5. Bidang Social Engineering

Social Engineering diartikan sebagai: penerapan pengetahuan tentang kehidupan sosial pada masalah sosial yang khusus. Dalam hal ini social engineering mencakup segala bidang spesialisasi yang merupakan hasil riset sosial. Misalnya perencanaan masa depan yang berupa perencanaan kota dan perencanaan daerah.

6. Bidang-bidang lain

Masih banyak bidang-bidang lain dalam ilmu sosial yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: psikologi anak, analisis opini umum, penelitian pasar, dan lain-lain.

E. Konsep-konsep Ilmu Sosial

Ilmu-ilmu sosial	Konsep-konsep Dasar
Ekonomi	Produksi, Barang dan Jasa, Ketergantungan, Pertukaran, Pembagian kerja, Konsumsi, Sistem moneter dan permintaan.
Politik	State / Negara, Kekuasaan, Kewenangan, Authority, Legitimasi, Sosial Kontrol, Pengaruh dan Wewenang Pemerintah.
Sosiologi	Peraturan Rule, Norma, status, Sistem Nilai, Comunity, pergaulan, interaksi, Individu, Pranata, Struktur, Kelompok
Antropologi	Kebudayaan, Unsur kebudayaan, Akulturasi, Asimilasi, Tradisi, Culture Area, Kelompok Etnik Kultur Universalisme, Etnosentrisme dan lain-lain
Psikologi sosial	Motivation, Perception and Felling, Attention, Kepribadian, Frustration, Attitudes, Aptitude dan lain - lain.
Sejarah	Perubahan, konflik atau perselisihan Revolusi, nasionalisme, peradaban, kontinuitas, perang freedom tokoh sejarah, dll.
Geografi	Lokasi Tempat, Wilayah (Region) Distribusi /Penyebaran, bentangan Alam (Landkap) Interaksi antar Ruang, Lingkungan Hidup, Sumber Alam, Pola Pemukiman dll.

Tabel 1.1

F. Hubungan IPS dengan Ilmu-ilmu Sosial

1. Hubungan Ilmu Sejarah dengan Ilmu Sosial

Keberadaan ilmu-ilmu sosial sangat membantu sejarah dalam mengungkap masalah kehidupan manusia masa lalu.

Apalagi dalam new history, sejarah sangat membutuhkan ilmu sosial untuk mempelajari aspek-aspek sosial yang kompleks. Demikian halnya ilmu-ilmu sosial sangat membutuhkan sejarah untuk melihat perkembangan kehidupan manusia pada masa sebelumnya. Bagi ilmu-ilmu sosial, sejarah dapat menjadi alat untuk melakukan generalisasi terhadap ilmu-ilmu sosial. Ilmuwan sosial juga dapat menjadikan permasalahan sejarah sebagai permasalahan sosial. Sebagai contoh adalah masalah tanam paksa yang ditulis sejarawan, dapat melahirkan masalah sosial berkaitan dengan struktur masyarakat Jawa dan perubahan perdesaan yang merupakan objek kajian sosiologi. Pendekatan sejarah yang memanjang (diakronis) juga dapat memberikan dimensi baru bagi ilmuwan sosial lainnya yang cenderung melakukan pendekatan sinkronis (meruang). Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa ilmu-ilmu sosial sangat bermanfaat bagi sejarah. Terdapat empat macam pengaruh ilmu sosial dalam sejarah yakni konsep, teori, permasalahan, dan pendekatan. Konsep yang ada dalam ilmu sosial dapat memengaruhi penulisan sejarah. Sebagai contoh adanya konsep local politics, dapat digunakan untuk menganalisis terjadinya gerakan pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. T. Ibrahim Alfian dalam buku Perang di Jalan Allah menerangkan Perang Aceh dengan teori collective behavior dari Neil J. Smelser. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku kolektif timbul melalui dua syarat, yakni ketegangan struktural dan keyakinan yang tersebar. Terdapat ketegangan antara masyarakat Aceh dengan kolonial yang menimbulkan ide perang sabil. Sedangkan permasalahan ilmu-ilmu sosial yang dapat digunakan dalam penulisan sejarah dapat dilihat misalnya tentang mobilitas sosial, kriminalitas, migrasi, gerakan petani, budaya istana, dan sebagainya. Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam penulisan sejarah pasti digunakan oleh sejarawan tiap kali menulis suatu

gejala yang relative panjang. Tulisan Sartono Kartodirjo tentang Pemberontakan Petani Banten, melakukan pendekatan ⁷geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan keagamaan untuk mengungkap dan menganalisis peristiwa tersebut. Walaupun pemberontakan hanya berjalan tidak lebih dari satu bulan, tetapi Sartono menganalisis dalam waktu yang panjang mulai masuknya kekuasaan Belanda, terjadinya letusan Gunung Krakatau, dan permasalahan sosial ¹¹keagamaan lainnya.

2. Hubungan Ilmu Geografi dengan Ilmu Sosial

Sebagaimana halnya ilmu-ilmu sosial lainnya, geografi memiliki peranan baik sebagai ilmu maupun sebagai alat untuk memecahkan masalah manusia. Selama dalam Perang Dunia I ⁹ maupun II, ilmu geografi sangat dibutuhkan pasukan untuk memetakan serangan dan mengetahui pihak lawan. Ilmu geografi juga dapat digunakan sebagai alat membantu membuat keputusan dan kebijakan. Berdasarkan konsep-konsep yang terdapat dalam geografi, dapat diambil manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu ilmu sosial, geografi tidak dapat berdiri sendirian, baik untuk memajukan keilmuan maupun untuk menyelesaikan masalah sosial. Sebagai contoh, untuk meneliti tentang pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, ahli geografi perlu meminjam konsep sejarah dan sosiologi guna memahami perkembangan dan kecenderungan sosial yang terjadi. Geografi juga sangat berdekatan dengan ilmu politik ketika membahas tentang letak dan konsep-konsep lainnya. Di sisi lain, ilmu-ilmu sosial juga sangat membutuhkan geografi sebagai alat bantu maupun embrio permasalahan yang akan diteliti. Sebagai contoh dalam ilmu sejarah, sangat membutuhkan data-data geografis tentang kemajuan yang dicapai setiap kerajaan di Indonesia. Ilmu politik akan meminjam konsep geografi untuk memaparkan partisipasi politik penduduk di daerah

pedalaman. Untuk memecahkan masalah-masalah sosial manusia, antara ilmu sosial sering digunakan bersama-sama. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan masalah bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi. Tidak mungkin masalah ini diselesaikan dari satu bidang ilmu saja. Semua disiplin ilmu sosial bahkan agama dan ilmu alam maupun humaniora dibutuhkan untuk membantu permasalahan tersebut.

3. Hubungan Ilmu Sosiologi dengan Ilmu Sosial

Apa persamaan dan perbedaan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya seperti sejarah, antropologi, politik, atau yang lain? Sosiologi dengan sejarah adalah ilmu sosial yang sama-sama mempelajari tentang kehidupan manusia. Hanya saja sejarah lebih menekankan pada kehidupan masa lalu, sementara sosiologi menekankan pada pola kehidupan manusia pada masa sekarang. Demikian ilmu sosiologi dengan antropologi, keduanya sama-sama mempelajari tentang manusia. Hanya saja antropologi menekankan pada aspekkebudayaan baik fisik maupun yang dihasilkan manusia. Dengan demikian, pada dasarnya sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya sangat erat hubungannya. Sebagai contoh sosiologi dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah membutuhkan sosiologi untuk memahami pola kehidupan masyarakat, sementara ilmu sosiologi membutuhkan ilmu sejarah untuk membantu melihat perkembangan umat manusia.

Hubungan ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi tampak dalam kasus bagaimana setiap masyarakat memiliki kecenderungan melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan kegiatan ekonomi tersebut bukan sekadar disebabkan oleh faktor geografis saja, tetapi juga faktor sosial. Contoh sederhana adalah mengapa konsumsi daging sapi di Pulau Bali atau di India sangat rendah? Akibatnya ekspor sapi dari India sangat tinggi. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh social budaya masyarakat yang menjadikan sapi sebagai sosok

utama dalam keyakinan mereka. Di masyarakat tersebut sapi dimuliakan, sehingga haram untuk dimakan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku social masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Timur pada pemilu 1999 sangat besar. Hal ini tidak lepas dari peran Gus Dur sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Contoh ini dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana memahami perilaku politik masyarakat sangat erat kaitannya dengan perilaku sosial mereka. Sosiologi sangat diperlukan untuk memahami perilaku masyarakat.

4. Hubungan Ilmu Antropologi dengan Ilmu Sosial

Hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu sosial, menurut Koentjaraningrat (1981:35—41), mengemukakan sebagai berikut.

a. Hubungan Antropologi dengan Sosiologi

Dalam antropologi budaya mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial budayanya. Antropologi berusaha mengurangi masalah keterikatan teori dengan kebudayaan tertentu dengan cara mempelajari seluruh umat manusia.

b. Hubungan Antropologi dengan Psikologi

Psikologi membahas faktor-faktor penyebab perilaku manusia secara internal, seperti motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan lain-lain. Sedangkan dalam antropologi khususnya antropologi budaya lebih bersifat faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti luas.

c. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Sejarah

Antropologi memberikan bahan prehistory sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dari tiap bangsa dunia. Para antropolog memerlukan sejarah untuk

merekonstruksi suatu rangkaian sejarah dari suatu peristiwa sejarah.

d. Hubungan Antropologi dengan Geografi

Antropologi berusaha menyelami keanekaragaman manusia yang dilihat dari ras, etnis, maupun budayanya (Soentjaningrat, 1981:36). Dan antropolog juga memerlukan geografi karena tidak sedikit masalah manusia.

e. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Ekonomi

Seorang ekonom memerlukan bahan yang komparatif tentang berbagai unsur masyarakat yang terdapat di dalam antropologi.

f. Hubungan Antropologi dengan Ilmu Politik

Agar dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa maka metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ahli politik.

5. Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Sosial

Ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya memiliki kesamaan dalam objek formalnya yakni manusia dan perilakunya. Dengan demikian ilmu ekonomi sangat berkaitan erat dengan induknya yakni ilmu sosial. Hanya saja dalam perkembangannya ilmu ekonomi sering memperoleh tempat yang lebih istimewa di tengah tengah masyarakat. Karena ilmu ekonomi berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masalah manusia, maka sering mendapat perhatian lebih. Hubungan antara ekonomi dan sosiologi bahwa ekonomi yang merupakan basis perilaku sosial yang ikut menentukan tipe dan bentuk interaksi mereka. Para ahli sosiologi mengakui bahwa ekonomi dan material itu memiliki pengaruh atas minat serta motivasi kerja pada masyarakat. Memahami perilaku ekonomi suatu masyarakat tidak bisa lepas dari perilaku sosial masyarakat tersebut. Sebagai contoh keyakinan masyarakat sangat berpengaruh

pada pola perilaku ekonomi mereka. Ilmu ekonomi sangat berkaitan erat dengan ilmu politik, sehingga banyak kajian tentang politik ekonomi dan ekonomi politik. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat memengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi (oikonomos) mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada abad XVII, Montchretien de Watteville memperkenalkan istilah "ekonomi politik" yang menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan ekonomi.

6. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial

Ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang sangat dekat hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Misalnya hubungan politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. Bahkan dalam politik praktis sejarah dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan. Hubungan ilmu politik dengan sosiologi, bahwa sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Sedangkan ilmu politik dapat membantu kajian struktur dalam penelitian sosiologi. Ilmu antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Sedangkan hubungan dengan ilmu ekonomi, pada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak

digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan Negara Inggris dalam menghadapi saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad XVIII dan XIX.

8 Bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi? Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau "psyche" seseorang. Pengetahuan "psyche" seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap orang itu.

8 Hubungan politik dengan ilmu geografi dapat dijelaskan bahwa segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain, kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim dan sebagainya. Terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik.

7. Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial

Bagi ilmu hukum, ilmu-ilmu sosial sangat bermanfaat sebagai sumber dalam mengkaji perkembangan hukum di dunia. Ilmu-ilmu sosial dalam satu sisi juga dapat menjadi sumber hukum dalam hukum praktis. Sebagai contoh dalam kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua Negara menggunakan aspek sejarah sebagai alat legitimasi hukum bahwa keduanya merasa berhak atas dua pulau tersebut, yang akhirnya dimenangkan Malaysia. Baik dalam penelitian hukum maupun hukum praktis ilmu

sosial sangat besar peranannya. Ilmu hukum juga sangat besar peranannya dalam kemajuan ilmu-ilmu sosial. Semua ilmu sosial selalu berkaitan dengan masalah hukum, entah itu perjanjian, custom, dan masalah-masalah lainnya. Untuk memahami tentang sistem kekerabatan, ilmu hukum sangat membantu sosiolog melakukan penelitian. Demikian halnya untuk memahami sejarah ketatanegaraan, sejarawan pasti akan menggunakan pendekatan hukum.

8. Hubungan Psikologi dengan Ilmu Sosial

Di dalam kajian sejarah terdapat jenis *psychohistory*. Kajian sejarah psikologis ini mempelajari psikologi tokoh-tokoh dalam sejarah. Dalam melakukan kajian sejarah tersebut jelas sejarawan memerlukan ilmu psikologi untuk memahami kejiwaan para tokoh. Bagi psikologi penelitian sejarah tersebut sangat penting sebagai alat memahami pola atau kecenderungan psikis para tokoh pada masa sekarang. Ilmu sosiologi mempelajari masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan perilaku menyimpang. Dalam mempelajari masalah kemiskinan, sosiolog sering melakukan pendekatan psikologis untuk memahami psikis subjek penelitian. Demikian halnya ketika meneliti penyimpangan sosial yang terjadi, para sosiolog dapat meminjam konsep dan teori dalam psikologi untuk mengungkap masalah tersebut. Kedua contoh di atas tidak berbeda dengan yang terjadi pada ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi telah memperoleh tempat khusus dalam setiap disiplin ilmu sosial. Bahwa ilmu psikologi dan ilmu sosial lainnya saling membutuhkan dan saling membantu.

BAB II

PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL ABAD KE-19

A. Tahap Perkembangan Ilmu Sosial

9 Ilmu sosial merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam bidang ilmu ini, manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Pada zaman Yunani, ilmu pengetahuan pernah menjadi bagian dari ilmu filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Dengan adanya perkembangan zaman dan peradaban manusia, ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari ilmu filsafat telah memisahkan diri dan berkembang sesuai dengan tujuan disiplin masing-masing. Lalu pada abad ke-19, lahirlah sebuah ilmu pengetahuan baru yang masih dipelajari hingga saat ini, yaitu Psikologi dan Sosiologi. Secara singkatnya, ilmu psikologi mempelajari tentang tingkah laku manusia, sedangkan ilmu sosiologi mempelajari tentang sistem sosial yang ada dalam diri manusia.

Istilah pendidikan sebenarnya juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*paedagogie*” yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yaitu “*education*” yang artinya pengembangan atau bimbingan. Kemudian dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “*tarbiyah*” yang artinya pendidikan (Ramayulis, 2002: 1).

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu dalam artian yang lebih luas, pendidikan dapat diartikan sebagai tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia, juga proses

penggunaan hamper seluruh pengalaman kehidupan (Muhibbinsyah, 2010: 10).

1. Ilmu Psikologi

8

Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*psyche*” yang berarti jiwa, dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari makna kata tersebut, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa, yang mana hal tersebut tidak bisa dilihat atau diketahui secara empiris. (Rohmah, 2012: 1).

Psikologi pendidikan sebagai salah satu cabang dari psikologi dan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam proses belajar mengajar memiliki hubungan yang erat dengan ilmu mengajar. Dimana dalam proses mengajar, para pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai terhadap materi yang akan diajarkan, dan juga menguasai berbagai metode dalam penyempaiannya agar apa yang disampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu jiwa pendidikan (psikologi pendidikan) juga merupakan suatu tuntutan bagi orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan (Ichsan, 2016).

Menurut beberapa ahli, pengertian psikologi pendidikan sebagai berikut:

- a. Menurut Whetherington (1982, 10), psikologi pendidikan adalah suatu studi yang sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia.
- b. Crow dan Crow (1958, 7) menjelaskan bahwa “*Educational psychology can be regarded as applied science, in that it seeks to explain learning according to scientifically determined principles and fact concerning human behavior*”. (Psikologi pendidikan dapat dipandang sebagai ilmu pengetahuan praktis, yang berguna untuk menerangkan

belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia).

- c. Menurut Good (1954, 427), menyatakan bahwa “*Educational psychology is a study of the nature of learning*”. (Psikologi pendidikan merupakan suatu kajian tentang hakikat belajar).
 - d. Menurut Winkel (1983, hal. 19) mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai ilmu yang mempelajari prasyarat-prasyarat (faktor-faktor) bagi pelajar di sekolah, berbagai jenis belajar, dan fase-fase dalam semua proses belajar.
 - e. Menurut Abror (1993, 10) berpendapat bahwa psikologi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli tidak terlihat memiliki perbedaan yang esensial, satu sama lain mengandung kesamaan pandangan. Sehingga Abror menyimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang berlangsung dalam proses belajar-mengajar.
2. Ilmu Sosiologi

Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte (1798-1857), seorang ahli filsafat sosial Perancis, pada tahun 1838 dalam bukunya *Positive Philosophy*. Menurutnya, sosiologi perlu dipahami dengan cara observasi dan klasifikasi yang sistematis, bukan melalui kekuasaan dan spekulasi. Comte menjauhkan teologi serta metafisika dan justru menekankan unsur empiris yang berkaitan dengan kemasyarakatan, baik dalam keadaan statis (struktur sosial) maupun dalam aspek dinamisnya (proses sosial), yang menjadi unsur dalam setiap masyarakat. Pada saat itu sosiologi di Eropa tumbuh dari pemikiran filsafat Comte, sehingga Comte dianggap sebagai “Bapak Sosiologi”. Namun bukan berarti sebelumnya tidak ada pemikiran-

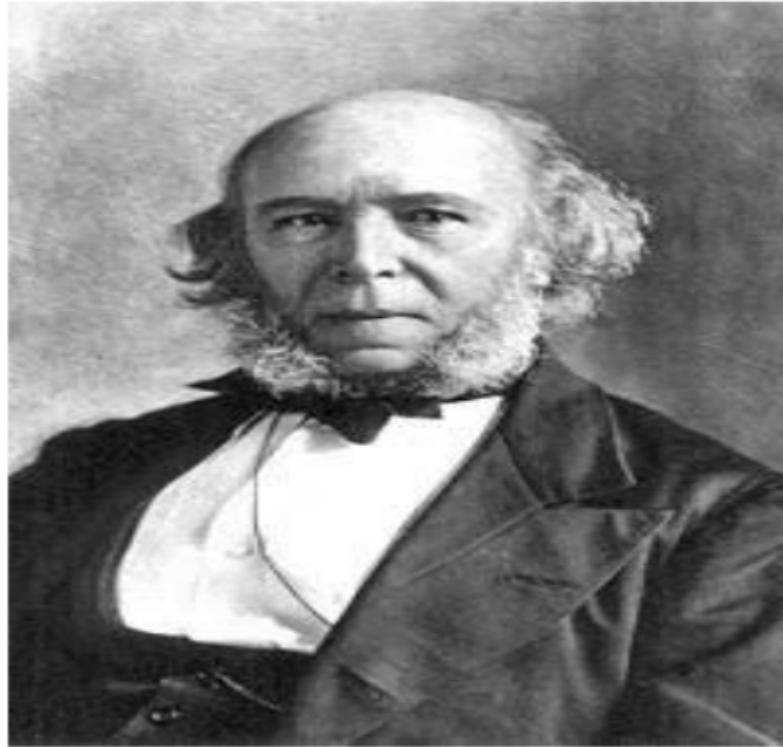
pemikiran yang membahas fenomena dan realitas dalam masyarakat dengan sudut pandang sosiologi. Misalnya saja seorang ahli sejarah bernama Ibn Khaldun (1332-1406) dalam bukunya “Mukadimah” mengisahkan masyarakat dengan keruntuhan dan kehancuran Gubernur-Gubernur militer Arab di Afrika Utara dan Spanyol Selatan.



Gambar 1.1

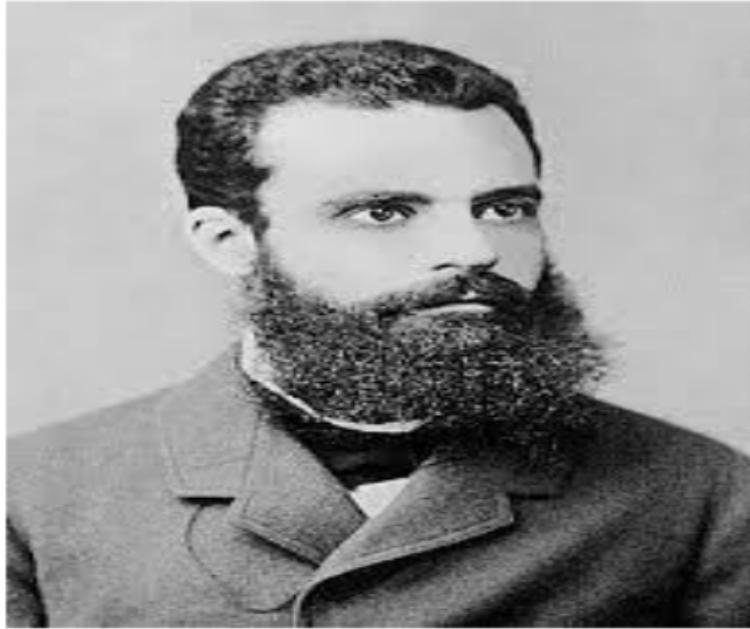
Setengah abad kemudian, Herbert Spencer mengembangkan sebuah sistematika penelitian masyarakat dalam bukunya yang berjudul “Principle of Sociology” tepatnya pada tahun 1876 yang berpendapat bahwa sosiologi mempunyai dasar biologi dan kemudian mencoba menerapkan evolusi organik pada masyarakat manusia dengan asumsi dasar bahwa “masyarakat adalah suatu organisme”. Selain itu, Vilfredo-Pareto (1848-1923) juga mengemukakan sebuah pendekatan yang mengatakan bahwa “masyarakat dipersiapkan sebagai suatu sistem astronomi (perbintangan)” dimana unsur-unsurnya bukan

planet, melainkan manusia yang saling menarik dan menolak (repulse) satu dengan yang lainnya, seperti atom-atom dalam benda fisik.



Gambar 1.2

Sosiologi dapat bertitik tolak dari masing-masing perspektif di atas, akan tetapi pendekatan Vilfredo-Pareto juga mengingkari satu keistimewaan masyarakat manusia, yaitu keanekaragaman kebudayaan dalam masyarakat. Keistimewaan manusia yang memiliki akal dan nilai-nilai menambah ragam variasi yang besar dalam masyarakat yang berbudaya. Oleh karena itu, untuk memahami gejala-gejala sosial dalam masyarakat menjadi lebih sulit yang disebabkan oleh berbagai unsur dalam masyarakat otonom bisa berubah.



Gambar 1.3

B. Tahap Perkembangan Ilmu Sosial

Perkembangan ilmu sosial pada umumnya mengikuti perkembangan ilmu alam, sebagaimana perkembangan ilmu sosial memiliki tiga tahapan seperti berikut:

1. Adanya Pengakuan Terhadap “a set of related problem”; dimana komunikasi atau gagasan diantara mereka menghasilkan sebuah *Asset of Generation*, dimana yang paling sedikit merupakan perkiraan atau gagasan.
2. Usaha Untuk Menemukan Metode Penelitian; Didiplin tahap kedua ini dipegang oleh spesialis akademis.
3. Tahap Kematangan; Dimana dalam tahap ini ditandai dengan adanya pertentangan di dalam metode teori-teori.

BAB III

PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL TIAP NEGARA PASCA PERANG DUNIA II

Ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya. Dalam hal ini, manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Setelah terjadinya perang Dunia II, para ahli indologi Belanda tidak dapat kembali untuk menjadi pegawai pengarah peraja di daerah-daerah terpencil yang telah mereka jajah, sehingga mulai terjadi pengalihan tugas kepada orang Indonesia contohnya seperti kursi sosiologi diserahkan kepada orang Indonesia, yakni G.T.S Mulia, seorang ahli falsafah pendidikan dan sosial. Namun demikian kursi antropologi masih di duduki sarjana Belanda G.J. Held.

Sebelum Perang Dunia II Indonesia juga sudah menjadi perhatian para antropolog negara lain, seperti Amerika. Mereka itu adalah pelopor-pelopor antropologi dari sub didiplin Culture and personality, yang kini terkenal dengan nama antropologi psikologi.

Penelitian sarjana Amerika dari masa sebelum perang dunia II yang sangat penting adalah dari ahli antropologi psikologi Cora Dubois. Tujuan penelitiannya adalah untuk mencari keperibadian rata-rata (*modal personality*) dari orang-orang yang hidup di masyarakat luar kebudayaan Ero-Amerika.

Di antara tahun-tahun 1957-1958, berhubung dengan buruknya hubungan politik Belanda dan Indonesia dalam masalah Irian jaya, kebanyakan sarjana Belanda meninggalkan Indonesia. Sebagai akibatnya Indonesia telah menjadi wilayah tertutup bagi peneliti Belanda dan indologi. Keadaan ini menyebabkan peneliti dari negeri Belanda tidak berminat lagi terhadap Indonesia terkecuali Irian Jaya, yang pada masa itu masih di kuasai Belanda untuk beberapa tahun lamanya.

Para sarjana Amerika telah menggantikan kedudukan Belanda, akan tetapi bukan hanya Indonesia yang di inginkan oleh Amerika

melainkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara setelah terjadinya Perang Dunia II.

Pusat ilmu pengetahuan di Amerika Serikat yang giat dalam usaha ini adalah Cornell University, yang mempunyai program Asia Tenggara merupakan bagian dari jurusan kajian timur jauh, tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga mendidik ahli-ahli melalui program PhD-nya di daerah tersebut. Nama programnya yaitu, *Moderen Indonesian Project*, di mana ahli politik G. McT. Khain adalah direktornya.

Pusat kajian Indonesia lainnya di Amerika Serikat adalah *Massachusetts Institute of Technology*, bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah internasional setelah perang Perang Dunia II, dilihat dari aspek-aspek kebudayaan, ekonomi dan politik. Negara-negara yang menjadi sasaran penelitian mereka adalah Itali, India dan Indonesia.

Proyek penelitian antropologi di Indonesia yang paling terkenal dilakukan oleh MIT adalah kajian Mojokuto. Mojokuto adalah nama samaran dari kota kecil Pare di Jawa Timur. Kota ini sudah diteliti oleh suatu tim yang terdiri dari para antropolog dan sosiolog di bawah pimpinan ahli linguistik R. Handon. Semua peserta telah mempergunakan data yang dikumpulkan untuk menulis disertai mereka masing-masing.

Walaupun sebagian besar peserta proyek telah menggunakan data tentang Pare untuk penulisan disertasi atau untuk keperluan lainnya, namun tidak ada yang dapat memanfaatkannya sebaik Clifford Geertz, karena ia telah menulis serangkaian karangan yang menarik dalam bentuk buku ataupun artikel mengenai perkembangan ekonomi penduduk Pare di lihat dari sudut sosio-budaya dan religi mereka (Geertz, 1956; 1956a; 1956b; 1957; 1957a; 1960; 1963; dan 1963a).

Minat universitas Yale terhadap Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum Perang Dunia II, yakni pada waktu Raymond Kennedy, yang menyusun *Bibliography of Indonesian Peoples and Culture (1945)*, menjadi guru besar di jurusan antropologi. Setelah Perang Dunia II,

universitas itu juga mempunyai program kajian Asia Tenggara dengan ahli ilmu bumi K.J. Pelzer sebagai ketuanya.

Alumni Yale lainnya adalah L. Pospisil yang telah mengadakan penelitian di antara orang Kapauku dari Irian Jaya, dan telah menulis disertasi penting mengenai hukum adat mereka (Pospisil 1958). Antropologi Indonesia yang merupakan alumni universitas Yale adalah Koentjaraningrat, untuk tesis MA-nya ia telah menulis suatu pelukisan mengenai sistem kekerabatan Jawa (Koentjaraningrat, 1959a).

Universitas Harvard juga telah menghasilkan beberapa antropolog mengenai Indonesia, seperti Cora Dubois, K.G. Heider dan James L. Peacock. Cora Dubois melakukan penelitian di pulau Alor pada masa sebelum Perang Dunia II, dan ia sering di anggap pelopor penelitian kebudayaan Indonesia di Amerika terutama dalam sub-disiplin antropologi psikologi. Alumni Harvard yang lain adalah James L. Peacock yang telah meneliti seni pertunjukan rakyat di Jawa Timur yang di sebut Ludruk, hasil dari penelitian tersebut Surabaya dijadikan bahan disertasi yang diterbitkan dengan judul *Javanese Folk Drama and Change* (1964-1965).

Para antropologi Perancis juga berminat terhadap kajian Indonesia, mereka itu adalah mahasiswa- mahasiswa *G. Condominas di L'Ecole Pratique des Hautes Etudes*. Perhatian mereka pada umumnya dipusatkan pada kebudayaan-kebudayaan dari Indonesia Timur. L.Berte almarhum telah mengadakan penelitian yang mendalam mengenai orang Buna' dari Timor (1966), dan di antara orang Badui dari Jawa Barat (1965).

Para antropolog Soviet-Rusia juga berminat terhadap kajian Indonesia sebenarnya masih pada tahap penjajagan. Penelitian Antropolog Rusia pada umumnya berkaitan dengan proyek dari lembaga Sejarah dan Antropologi Mikluho Maklaya, yang merupakan bagian dari Akadmki Ilmu Pengetahuan Soviet Rusia. Proyek ini telah menerbitkan suatu seri dari buku-buku teks berjudul *Narody Mira* mengenai kebudayaan dari seluruh dunia.

Pada tahun 1960 sampai tahun 1968, keadaan politik di Indonesia kurang setabil, maka penelitian di Indonesia bagi orang asing di tutup, sewaktu-waktu penelitian orang asing diizinkan lagi sehingga kegiatan penelitian di Indonesia menjadi ramai. Di antara tahun 1970 sampai tahun 1978 misalnya ada 315 antropolog dan 27 sosiolog yang datang dari luar negeri. Yang paling banyak jumlahnya adalah orang Amerika (115); Jepang (47); dan Belanda (44), sebagai nomer dua dan tiga (Koentjaraningrat, 1975a) para peneliti lainnya adalah dari berbagai kebangsaan seperti Australia, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, Singapura, New Zealand, Italia, Srilangka, Belgia, Filipina, Swiss, Norwegia dan Swedia.

Beberapa dari peneliti asing tersebut mempergunakan data yang di kumpulkan untuk dijadikan disertasi mereka hal itu telah di lakukan misalnya oleh Judith Louise Ecklund dari Unuversitas Comell (1977). Ia adalah murid dari J. T Siegel. Selama di pulau Lombok Ecklund telah meneliti bahasa ritual dari orang sasak sebagai media simbolik yang memberikan kelangsungan struktural kepada interaksi sosial para pendukungnya. Peneletiannya ini termasuk etnolinguistik atau antropologi linguistik.

Pada permulaannya, setelah perang dunia II, hampir seluruh penelitian secara ilmiah mengenai Indonesia dilakukan oleh orang Eropa, terutama berlaku di Universitas Indonesia pada masa itu. Hal itu dikarenakan di sana masih dikuasai oleh ilmuan Belanda. Namun keadaan seperti itu tidak berlaku di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Hal itu dikarenakan oleh orang Indonesia yang mengajarkan ilmu antropologi maupun sosiologi, yakni Prof. M.M. Djodjodigono. Djodjodigono merupakan yang pada masa sebelum perang dunia II pernah menjadi pegawai pangreh praja, sehingga dapat mengumpulkan data mengenai hokum adat dari Jawa Tengah. Demikianlah bersama seorang ahli hukum adat Tirtawinata, ia dapat merangsang minat para staf pengajar dan para mahasiswanya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Gadjah Mada untuk mengadakan penelitian kebudayaan Indonesia.

A. Perkembangan Ilmu Sosial di Asia

Pada masa kolonial Belanda, ilmu sosial sering mengarah kepada kepentingan para pemegang kekuasaan kolonial. Kejadian ini belakangan terulang kembali, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dimana belakangan ini, ilmuan sosial banyak menyesuaikan keinginan dari birokrasi atau penguasa.

Perkembangan ilmu sosial di negara-negara berkembang ini memanglah tidak sepesat perkembangan ilmu alam. Namun hal ini bisa diatasi apabila para ilmuan sosial mampu berpikir kritis dan berpihak pada kebenaran serta diperlukan juga sebuah suasana keterbukaan. Hal ini dilakukan dengan harapan para ilmuan sosial mampu menganalisis persoalan sosial secara jernih dan tidak spekulatif. Apabila hal ini tercapai, maka ilmu sosial akan mampu memberikan kontribusi yang maksimal, karena bukan tugas ilmu-ilmu sosial untuk mengusulkan jalan keluar, apalagi menyelesaikan persoalan.

Asia Tenggara merupakan salah satu dari kawasan-kawasan di dunia yang sedang mengalami perubahan yang pesat. Sepanjang 30 tahun terakhir, proses modernisasi secara revolusioner telah direkayasa oleh pengatur negara (menurut Bre Redana, hidup manusia modern ini adalah perjalanan dari kekecewaan ke kekecewaan karena apa yang ingin dijalani dan apa yang bisa dijalani makin lebar jalannya). Rencana pembangunan nasional seringkali merupakan upaya yang paling ambisius menuju perbaikan kesejahteraan materi dan sosial. Khususnya di Asia Tenggara, pembangunan sosial merupakan mandate politik, suatu cara untuk memecahkan urusan di kancah internasional. Disamping sebagai sarana yang lazim untuk transformasi ekonomi dan masyarakat di dalam negara (Robertson, dalam Nico Schult dan Leontine Visser, 1997).

B. Perkembangan Ilmu Sosial di Eropa

Perkembangan sosial adalah keadaan dinamis yang terjadi pada kelompok sosial, interaksi sosial, stratifikasi sosial dan

institusi sosial. Dengan kata lain, perkembangan sosial adalah keadaan dinamis dalam masyarakat.

Hegemoni Amerika berkembang setelah Perang Dunia II berakhir. Untuk membaca konstelasi politik internasional pasca perang dunia II dari sudut pandang akademik, peneliti akan menyitir tulisan Shaumil Hadi (2008: 61-75). Secara spesifik yang dimaksud adalah disiplin Hubungan Internasional bagian dari rumpun ilmu politik. Penjelasan ini menarik karena telaah-telaah yang muncul ke permukaan kebanyakan didominasi oleh babaran realitas ekonomi-politik tidak melihatnya sebagai implikasi dari perdebatan teoritik keilmuan. Meningkatnya pengaruh realisme dalam kajian hubungan internasional boleh jadi secara umum dapat dilihat sebagai suatu respon terhadap kegagalan idealisme-liberal dalam menjelaskan anomali peristiwa di sekitar 1930-an, yang akhirnya memicu perang dunia II. Hadi menilai, para idealis-liberal mengalami salah tafsir atas harapan dan esensi politik bangsa Eropa di tahun itu. Prediksi atas terbangunnya perdamaian, demokratisasi, modernisasi, pasca perang dunia I hanyalah utopia dan merupakan pemahaman yang bias pemenang. Bukan dari perspektif negara-negara kalah (oposan).

Dalam bahasa Carr yang dicuplik Hadi, para idealis-liberal telah memungkiri peta politik dan perimbangan kekuasaan di Eropa yang justru tampil dalam keadaan yang *menyolok* antara “yang punya dan yang “tidak punya”. Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat merupakan pihak “yang punya”, dalam artian kekuatan besar yang berorientasi pada pelanggaran *status quo*. Sedangkan Jerman, Italia, Jepang, adalah pihak “yang tidak punya”. Jadi, sudah sewajarnya, menurut kaum realis, jika “yang tidak punya”, akan coba memperbaiki keseimbangan internasional melalui penggunaan kekuatan fisik (*hard power*). Oleh karena itulah, politik pembagian kekuasaan pasca Konferensi Perdamaian Paris 1919, ternyata menyisakan duri dalam

daging (salah satunya Jerman) yang lama- kelamaan membusuk dan pecah di perang dunia II.

Dengan demikian, di mata realis kesalahan terburuk yang menghinggapi para idealis-liberal adalah mereka berangkat dari harapan semu atas indahnya inter-relasi negara di dunia, padahal dalam kenyataan politik internasional, politik condong bercorak “politik kekuasaan” dengan orientasi “kepentingan nasional”. Pada titik inilah pemahaman realis unggul terkait relevansi dan kontekstualitasnya. Sebagai imbas, secara cepat realisme menjadi pendekatan *mainstream* yang mempengaruhi cara pandang para diplomat, pembuat keputusan, serta ilmuwan politik. Berikut adalah elemen dasar yang dikandung realisme:

1. Pengedepanan kepentingan nasional
2. Peningkatan kekuatan dan
3. Keseimbangan kekuasaan

Kaitannya dengan posisi dan peran Amerika Serikat, para ilmuwan politik (realis) jamak menilai, perimbangan kekuasaan mutlak diperlukan; karenanya harus ada suatu kekuatan tertentu (di luar Eropa) yang dapat mendorong penciptaan stabilitas. Amerika Serikat yang pada awalnya, di kurun waktu antara perang dunia I dan perang dunia II, menerapkan politik isolasionisme oleh karena dasar perbedaan geografis, ideologis, dan kebudayaan dengan negara lainnya di dunia, akhirnya pun dengan segera didorong dalam kancah perang tersebut. Pendeknya, campur tangan tangan Amerika Serikat dalam perang dunia II di Eropa, dan kemudian belahan dunia lainnya (karena faktor eskalasi kekuatan Jepang di Asia Timur Raya).

Dimulailah eksplorasi keilmuan oleh para intelektual untuk mencari format baru dalam mewujudkan ambisi Amerika Serikat sebagai *super-power* baru. Adalah Joseph Nye Jr, akademisi Harvard, tokoh yang dengan getol mempopulerkan konsep *soft power* dalam diskursus hubungan internasional. *Soft power* hadir sebagai tawaran atas kebijakan politik luar negeri AS untuk

mempertahankan dan mengembangkan supremasi kekuasaan global. *Soft power* dianggap relevan dan kontekstual sejalan dengan semangat perdamaian, nir kekerasan, antikolonial, serta situasi bipolar pasca perang dunia II. Walaupun konsep ini berkembang secara sistematis di tahun-tahun 1980-an, namun pada dasarnya embrio konsep ini telah mengemuka dan tercermin dalam kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat lepas tahun 1950, bahkan juga di negara lain pada waktu yang lebih lampau. Secara sederhana *soft power* sendiri dapat didefinisikan *the power of persuasion through ideas, cultures, and policies* (Nye, 2002).

Konsep ini pada perjalanannya berhasil memberi warna dominan atas kebijakan politik internasional berbagai negara di dunia, tak hanya Amerika Serikat, walaupun tanpa meniadakan strategi *hard power* yang penuh kepentingan. Sebagaimana lazim diketahui bahwa industri perang suatu negara adalah satu sumber keuangan terpenting. Dalam logika industri, profit dapat mengalir bila proses produksi belangsung lancar karena permintaan yang tinggi atau setidaknya konstan. Pada titik ini, selain sebagai strategi kuasa, perang juga perlu dipahami dari perspektif ekonomi. Dengan demikian, *soft power* hadir tidak berarti menyingkirkan eksistensi *hard-power*, namun justru sebagai pelengkap (komplementer) atau strategi alternatif.

C. Perkembangan ilmu sosial di Timur Tengah

1. Keadaan Sosial Bidang Pendidikan

Kehidupan intelektual di era Dinasti besar ini diawali dengan berkembangnya perhatian pada perumusan dan penjelasan panduan keagamaan terutama dari dua sumber utama yaitu Al- Qur'an dan Hadis. Dari kedua sumber ini kemudian muncullah berbagai keilmuan lainnya. Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Hadis adalah dua rangkaian seri pengetahuan yang menjadi fokus dan pokok perhatian waktu itu. Perhatian itu dapat dilihat dengan banyaknya kitab yang ditulis untuk menjelaskan Al-Qur'an dan Hadis. Gambaran

ini merupakan bukti bahwa Dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah.

Sekolah dasar pada periode Abbasiyah biasanya merupakan bagian yang terpadu dengan masjid. Kurikulum utama dipusatkan pada Al-Qur'an sebagai bacaan siswa selain mereka diajarkan juga baca-tulis. Seiring dengan belajar baca-tulis, siswa juga mempelajari tata bahasa Arab, kisah-kisah para nabi, dasar-dasar aritmatika, dan puisi dengan syarat tidak bersifat erotis. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah metode menghafal. Kesempatan belajar pada tingkat sekolah dasar tidak hanya dapat dirasakan oleh anak-anak laki-laki, tetapi kesempatan yang sama juga dirasakan oleh anak-anak perempuan. Meski kemudian mereka tidak dapat menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi. Alasan utamanya, boleh jadi, karena menganggap dunia pendidikan bukan kebutuhan utama bagi anak perempuan. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya adalah Bait al-Hikmah, didirikan oleh al-Ma'mun di Baghdad. Selain berfungsi sebagai biro penerjemahan, lembaga tersebut dikenal juga sebagai pusat kajian akademik dan perpustakaan umum, dan memiliki sebuah observatorium.

Lembaga-lembaga keilmuan seperti perpustakaan dan akademi banyak bermunculan. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dapat diraih paling tidak dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, di antaranya, terjadinya akulturasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan

dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Akulturasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sebagaimana sudah disebutkan, sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, sastra, serta karya-karya dari Persia juga diterjemahkan. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi; sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat.

Babak penerjemahan yang segera diikuti oleh babak aktivitas kreatif yang diekspresikan oleh orang muslim tidak hanya membaurkan kebijakan kuno Persia dan Klasik Yunani dalam hal pembangunan budaya, tetapi juga mengadaptasikan keduanya sesuai dengan keadaan sosial dan pola pikir mereka.

2. Keadaan Sosial Bidang Pertanian

Keadaan sosial bidang pertanian di era ini maju pesat pada awal pemerintahannya. Hal ini disebabkan posisi pusat pemerintahan Abbasiyah sendiri berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang biasa dikenal dengan nama sawad. Pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Irigasi lama dari aliran sungai Eufrat dihubungkan dengan saluran irigasi baru sehingga membentuk sebuah “jaringan yang sempurna”. Kanal besar pertama, yang disebut Nahr ‘Isa setelah digali kembali oleh keluarga al-Mansur menghubungkan aliran sungai di Anbar sebelah barat laut dengan sungai Tigris di Baghdad. Kanal

kedua adalah Nahr al-Malik yang tersambung ke Sungai Tigris di bawah al-Madain.

Tanaman asli di Irak terdiri dari gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Daerah yang paling subur adalah di dataran tepian sungai ke selatan, sawad, yang menumbuhkan berbagai jenis buah-buahan dan sayuran, yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Kacang, jeruk, terung, tebu dan beragam bunga seperti mawar dan violet tumbuh dengan subur. Hasil pertanian yang melimpah seperti ini menjadi salah satu sumber pendapatan kerajaan yang terbesar. Ya'qubi sebagaimana kutip Philip K. Hitti mengilustrasikan bahwa secara politik daerah pertanian didiami oleh orang-orang Transoxiana dan Sijistan yang memiliki sumber daya manusia yang baik. Karena itu, tidak mengherankan kalau daerah itu dikenal pada zaman al-Ma'mun sebagai "kerajaan yang utuh".

3. Keadaan Sosial Bidang Perdagangan dan Industri

Sementara itu, pranata sosial yang berhubungan dengan perdagangan dan industri pada awalnya dipegang oleh orang Yahudi, Kristen, dan Zoroaster, namun belakangan digantikan oleh orang-orang Arab yang lebih suka berdagang daripada bertani.

Harus diakui, kekuasaan kerajaan yang sangat luas dan tingkat peradaban yang tinggi itu dicapai dengan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang luas. Pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Basrah, Sairaf, Kairo, dan Iskandariyah segera berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan darat dan laut yang aktif. Para pedagang muslim telah mampu merambah sampai ke belahan dunia Timur, yakni Cina yang dilakukan sejak masa Khalifah kedua Abbasiyah, al-Mansur, sedangkan di sebelah barat pedagang muslim telah mencapai negeri Maroko dan Spanyol. Semua capaian tersebut karena didukung oleh pengembangan industri rumah tangga dan pertanian yang maju. Industri

kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas dan kain wol, satin, dan brokat, sofa dan sarung bantal, juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya.

Namun, pengaruh dari pertumbuhan perdagangan yang pesat menyebabkan para pedagang mendapat banyak keuntungan dan mulai menguasai tanah yang luas serta menjadikannya sebagai lahan investasi. Hal ini menyebabkan munculnya kepemilikan pertanian yang besar. Sebaliknya, para petani kecil terhimpit beban pajak yang sedemikian rupa sehingga hal ini mendorong mereka mencari sarana guna menghindarkan diri, yaitu sarana yang disebut dengan *ilja'*, yakni seorang petani mencatatkan tanahnya di Departemen Perpajakan atas nama figur yang berpengaruh, dan menyerahkan sebagian penghasilannya sebagai imbalan atas perlindungannya. Modus ini terus berlanjut hingga akhirnya para petani ini merugi dan sebagian tanah mereka disita oleh pihak yang menjadi tempat perlindungannya dan mereka berubah menjadi petani penggarap saja.

4. Keadaan sosial bidang politik

Pembagian wilayah ke dalam provinsi yang dipimpin oleh seorang amir (Gubernur) di zaman Dinasti Abbasiyah selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Begitu pun klasifikasi politik tidak selalu terkait dengan klasifikasi geografis. Konsekuensi dari wilayah kekuasaan yang sangat luas dan sarana komunikasi yang sangat sulit masa itu mengharuskan sistem desentralisasi menjadi pilihan bagi para Khalifah Abbasiyah.

Khalifah berperan sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi, sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan pemimpin sakral. Di bawah khalifah ada lembaga wizarah yang bertugas sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam untuk mengangkat dan menurunkan para

pegawai. Wazir adalah pelaksana non-militer yang diserahkan oleh Khalifah kepadanya.

Setidaknya, ada dua model ke-wazir-*an* pada era Abbasiyah. Pertama, tafwid, yakni wazir yang memiliki kekuasaan sangat tinggi dan dapat bertindak tanpa restu dari khalifah, termasuk mengangkat dan memecat gubernur dan hakim tetapi tidak dapat memecat pegawai yang diangkat oleh Khalifah. Kedua, tanfid, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan terbatas, tidak berkuasa penuh, dan hanya mentaati perintah Khalifah saja. Di samping itu, terdapat dua jabatan penting, yaitu pertama haib; perantara antara rakyat dan khalifah; dan kedua jallad; algojo pelaksana hukuman termasuk hukuman mati.

Otoritas Gubernur dalam menangani isu-isu lokal cenderung sangat dominan dan jabatannya bisa diwariskan.³⁴ Walaupun secara teoretis ia memegang jabatan itu selama disenangi oleh wazir, yang merekomendasikan pengangkatannya adalah Khalifah, dan ia akan diturunkan dari jabatannya jika wazir itu diganti.

Al-Mawardi, seperti dikutip oleh Philip K. Hitti, membedakan jabatan gubernur ke dalam dua jenis: Pertama, imarah‘ammah (keemiran umum) yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur urusan militer, mengangkat, dan mengawasi hakim pengadilan, memungut pajak, memelihara ketertiban, menjaga mazhab resmi negara dari segala bentuk penyimpangan, menata administrasi kepolisian, dan menjadi imam pada salat Jumat. Kedua, imarah khassah (keemiran khusus) yang memiliki otoritas khusus dan tidak menguras peradilan dan perpajakan.

BAB IV
PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL DI TIAP NEGARA
PADA TAHUN 1960-1980

A. Perkembangan Ilmu Sosial di Asia

Manusia berubah, masyarakat berkembang dan ilmu sosial berinovasi. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu perubahan selalu membayangi dan mengintai kita layaknya sebuah kematian. Sekalipun kita berada di masyarakat tertutup yang teralienasi dari dunia luar, perubahan akan tetap terjadi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang signifikan dan masif mempengaruhi berbagai perubahan dalam segi kehidupan termasuk di dalam kehidupan sosial dan budaya. Salah satu pengaruh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah berubahnya hubungan sosial dan interaksi sosial yang dikaji dalam ilmu sosial.

Para sejarawan menggambarkan tahun 1970-an sebagai poros perubahan dalam sejarah dunia, dengan fokus terutama pada pergolakan ekonomi yang mengikuti akhir dari ledakan ekonomi pasca perang. Pada pasca perang dunia II ekspansi ekonomi, juga dikenal sebagai ledakan ekonomi pascaperang atau Golden Age of Capitalism, adalah periode luas di seluruh dunia ekspansi ekonomi awal setelah perang dunia II dan berakhir dengan 1973-1975 resesi. Amerika Serikat, Uni Soviet dan negara-negara Eropa Barat dan Asia Timur khususnya mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi dan berkelanjutan, bersamaan dengan tersedianya lapangan kerja penuh. Hal ini berlawanan dengan prediksi awal, pertumbuhan yang tinggi ini juga mencakup banyak negara yang hancur akibat perang, seperti Jepang, Korea Selatan, Belgia, Italia dan Yunani. Bahkan negara-negara yang relatif tidak terpengaruh

oleh perang seperti swedia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.

Di Asia, urusan mengenai Republik Rakyat Tiongkok berubah secara signifikan setelah pengakuan RRC oleh PBB, kematian Mao Zedong dan dimulainya liberalisasi pasar oleh penerus Mao. Meskipun menghadapi krisis minyak akibat embargo OPEC, ekonomi Jepang mengalami ledakan besar pada periode ini, menyalip ekonomi Jerman Barat menjadi yang terbesar kedua di dunia. Amerika Serikat menarik pasukan militernya dari keterlibatan mereka sebelumnya dalam perang Vietnam. Pada tahun 1979, Uni Soviet menginvasi Afghanistan, yang menyebabkan perang berkelanjutan selama sepuluh tahun.

Tahun 1970-an melihat peningkatan awal dalam kekerasan di Timur Tengah ketika di Mesir dan Suriah menyatakan perang terhadap Israel, tetapi pada akhir 1970-an, situasi di Timur Tengah secara fundamental berubah ketika Mesir menandatangani perjanjian perdamaian Mesir-Israel.

Sejarah ilmu sosial di Indonesia dapat dilihat dalam tiga fase perkembangan, yaitu: (1) Ilmu Sosial Kolonial (indologi); (2) Ilmu Sosial Develomentaris; (3) Ilmu Sosial Kontemporer. Ketiga fase tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, bukan hanya karena latar belakang yang berbeda namun dari karakteristik isi dan orientasi keilmuannya juga (Nasiwan & Wahyuni, 2016: 19).

Pada fase pertama, Indologi atau Ilmu Sosial Kolonial merupakan sebuah bagian dari pengetahuan terlembaga, yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan Kolonial di Leiden pada tahun 1848 dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada para calon administrator yang akan dikirim ke Hindia-Belanda. Dengan kata lain, setelah menaklukkan sebagian besar wilayah Indonesia, pemerintah kolonial akan membutuhkan pengetahuan mendalam tentang masyarakat jajahan untuk menguasai negeri jajahan tersebut.

2 Pada tahun 1920-an didirikanlah beberapa perguruan tinggi yang berkaitan langsung dengan ilmu sosial, yaitu Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) pada tahun 1924 dan Fakultas Sastra dan Filsafat pada tahun 1940. Ilmuan sosial pada masa itu didominasi oleh ilmuan Belanda yang mempelajari tentang Indonesia, seperti Snouck Hourgronye, BJO Schrieke, Wertheim, Van Vollenhoven, dan lain-lain.

Fase kedua adalah Ilmu Sosial Developmentalis. Fase ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya sejak tahun 1950-1960 dimana pada saat itu terjadi pergeseran penting dalam perkembangan ilmu sosial Indonesia. Mulanya Indologi yang berorientasi pada Eurosentrisme berubah menjadi ilmu sosial baru yang merujuk pada Amerika Serikat. Hal itu disebabkan oleh perubahan drastis kondisi politik Indonesia di satu pihak dan keadaan politik dunia.

2 Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berujung pada pengusiran semua guru besar Belanda yang mengajar di Indonesia pada tahun 1950. Putusnya hubungan antara Indonesia dan Belanda sejak tahun 1950 tersebut memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh banyaknya ilmuan sosial asal Indonesia yang mengenyam pendidikan pada guru-guru Belanda, seperti: Soepomo (hukum), T.G.S. Moelia (sosiologi), Koentjoroningrat (antropologi), Soekmono (arkeologi), Sartono Kartodirjo (sejarah), Slamet Imam Santoso (psikologi), Wijoyo Nitisastro (ekonomi), dan lain-lain.

Fase ketiga adalah Ilmu Sosial Indonesia Kontemporer. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase kedua, tetapi pada saat yang sama beberapa ciri pokoknya tetap ada dan bertahan hingga sekarang. Pada pertengahan tahun 1960, perkembangan ilmu sosial Indonesia belum bisa berkembang. Namun semenjak tahun 1970, seiring dengan kembalinya para sarjana ilmu sosial dari luar negeri mulai terdapat perkembangan yang penting. Pada tahun

1980, tingkat minat dan dukungan pemerintah terhadap ilmu sosial Indonesia melebihi negara manapun di Asia Tenggara. Hal ini merupakan dampak dari terkikisnya tradisi ilmu sosial kolonial (indologi) menjadi ilmu sosial developmentalis.

Daljoeni (1985: 155) menjelaskan mengenai kemajuan-kemajuan didalam perkembangan ilmu-ilmu sosial baik mengenai problematic, metodologi maupun pembentukan teorinya. Untuk menilai kemajuan dan kekurangan yang dialami oleh perkembangan tersebut, dapat dipakai titik tolak Mannheim yang mengatakan bahwa tata sosial akan mengalami keruntuhannya apabila kontrol rasional tak sejajar dengan perkembangan pengetahuan tentang masyarakat. Disamping itu terbukti pula bahwa rasionalitas dan kekuatan moril sebagai bekal pengendalian tak terbagi merata pada kelompok-kelompok sosial yang ada.

B. Perkembangan Ilmu Sosial di Eropa

Dalam bahasa Carr yang dicuplik Hadi, para idealis-liberal telah memungkirkan peta politik dan perimbangan kekuasaan di Eropa yang justru tampil dalam keadaan yang *menyolok* antara “Yang Punya (*The Have*)” dan yang “Tidak Punya (*The Have Not*)”. Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat (AS) merupakan pihak “yang punya”, dalam artian kekuasaan besar yang berorientasi pada pelanggaran status quo. Sedangkan Jerman, Italia, Jepang, adalah pihak “yang tidak punya”. Jadi, sudah sewajarnya, menurut kaum realis, jika “yang tidak punya”, akan coba memperbaiki keseimbangan internasional melalui penggunaan kekuatan fisik (hard power). Oleh karena itulah, politik pembagian kekuasaan pasca Konferensi Perdamaian Paris 1919, ternyata menyisakan duri dalam daging (salah satunya Jerman) yang lama-kelamaan membusuk dan pecah di PD II.

Jelaslah dengan demikian, di mata realis kesalahan terburuk yang menghinggapi para idealis-liberal adalah mereka berangkat dari harapan semu atas indahnya inter-relasi negara di dunia, padahal dalam kenyataan politik internasional, politik condong

bercorak “politik kekuasaan” dengan orientasi “kepentingan nasional”. Pada titik inilah pemahaman realis unggul terkait relevansi dan kontekstualitasnya. Sebagai imbas, secara cepat realisme menjadi pendekatan mainstream yang mempengaruhi cara pandang para diplomat, pembuat keputusan, serta ilmuwan politik. Berikut adalah elemen dasar yang dikandung realisme:

1. Pengedepanan kepentingan nasional (*national interest*)
2. Peningkatan kekuatan (*power maximisation*)
3. Keseimbangan kekuasaan (*balance of power*).

Kaitannya dengan posisi dan peran AS, para ilmuwan politik (realis) jamak menilai, perimbangan kekuasaan mutlak diperlukan; karenanya harus ada suatu kekuatan tertentu (di luar Eropa) yang dapat mendorong penciptaan stabilitas. AS yang pada awalnya, di kurun waktu antara PD I dan PD II, menerapkan politik isolasionisme oleh karena dasar perbedaan geografis, ideologis, dan kebudayaan dengan negara lainnya di dunia, akhirnya pun dengan segera didorong dalam kancah perang tersebut. Pendeknya, campur tangan tangan AS dalam PD II di Eropa, dan kemudian belahan dunia lainnya (karena faktor eskalasi kekuatan Jepang di Asia Timur Raya), dapat dinilai dalam kerangka ini.

C. Perkembangan Ilmu Sosial di Timur Tengah

Gerakan massa yang menuntun mundurnya rezim-rezim otoriter di berbagai negara Timur Tengah berhasil mendorong perubahan politik dalam skala yang sangat besar sebagai wujud dari aktivisme transnasional. Bagian ini akan memberikan ulasan bagaimana aktivisme transnasional menjadi salah satu variabel penting dalam proses perubahan politik di Timur Tengah.

Dalam kajian-kajian Hubungan Internasional, transnasionalisme menjadi tema yang mulai dibicarakan sejak akhir 1980-an. Menurut James Rosenau, transnasionalisme adalah proses di mana hubungan internasional yang dilangsungkan oleh pemerintah telah disertai oleh hubungan antara individu,

kelompok, dan pihak swasta. Proses hubungan ini memiliki konsekuensi penting bagi dunia internasional (lihat Jackson dan Sorensen, 2007: 101). Transnasionalisme melihat negara bukan lagi aktor utama dalam setiap interaksi hubungan internasional.

Dalam konteks reformasi di Timur Tengah, aktor di balik transnasionalisme adalah individu dan kelompok-kelompok individu, terutama para pemuda. Namun, transnasionalisme bukan penyebab langsung revolusi di Timur Tengah, melainkan dampak dan resultante politik dari ketidakpuasan rakyat atas rezim yang berkuasa. Transnasionalisme bersifat instrumental atas perubahan-perubahan politik. Pada titik ini, peran media sosial sebagai sebuah alat penyebaran wacana revolusi menjadi signifikan. Berkat peran media sosial, ketika perlawanan rakyat Tunisia berhasil meruntuhkan rezim Ben Ali yang telah berkuasa selama 24 tahun, masyarakat di negara-negara tetangga di Timur Tengah mulai berani untuk mengambil langkah yang sama. Aktivitas transnasional di Timur Tengah dalam konteks Arab Spring dapat dipahami melalui dua perspektif. Pertama, transnasionalisme dapat dilihat melalui attitude change atau perubahan perilaku. Kedua, transnasionalisme dipahami dengan interpretasi atas fakta bahwa generasi muda Timur Tengah memaknai simbol-simbol yang terdapat di luar negara ke dalam gerakan mereka. Pemaknaan simbol ini berujung pada satu kesimpulan, yakni penilaian bahwa terdapat kesamaan struktur antara negara mereka dengan mayoritas negara lain di Timur Tengah.

Meminjam argumen Sidney Tarrow, fenomena ini adalah salah bentuk aktivisme transnasional yang menggunakan metode dan taktik-taktik framing sebagai instrumen gerakannya. Artinya, dengan menggunakan kerangka berpikir seperti ini, media baru, dalam hal ini media sosial dan blog, menjadi penting untuk menyampaikan simbol-simbol dan pesan gerakan yang dibangun oleh para aktivis (Tarrow, 2005).

Pada era globalisasi, transnasionalisme akan berimplikasi pada suatu proses transformasi. Mereka yang berinteraksi akan saling mengadopsi pengetahuan yang kemudian akan mendorong perubahan perilaku. Dalam konteks Timur Tengah, perubahan perilaku terjadi di tingkat akar rumput, terutama pada generasi muda. Di satu sisi, interaksi transnasional yang intens membuat generasi muda Timur Tengah sadar bahwa mereka berhak akan kebebasan dan kehidupan yang lebih sejahtera seperti yang diperoleh oleh orang-orang lain di luar negeri mereka (Ghosh, 2011). Di sisi yang lain, sebagaimana diungkapkan Michele Angrist, gerakan massa yang semula hanya terjadi di Tunisia dan Mesir menjadi pemicu untuk lahirnya gerakan yang serupa di negara lain karena para aktivis transnasional sadar bahwa rezim otoriter juga hadir di negara lain (Angrist, 2011; Ghosh, 2011a).

Hambatan politik menyebabkan persebaran gagasan lintas negara secara fisik sulit dilakukan. Perkembangan teknologi membantu para aktivis transnasional berinteraksi secara tidak langsung melalui dunia maya. Aktivisme transnasional yang berlangsung di Timur Tengah berhasil memanfaatkan ruang publik melalui jejaring media sosial. Hassan Nafaa, seorang profesor ilmu politik di Universitas Kairo, menyebut para pemuda sebagai “*the Internet Generation or the Facebook Generation or just call them the Miracle Generation.*” (Ghosh, 2011a).

Kedua, transnasionalisme juga perlu dipahami sebagai basis penting dalam pembentukan ruang publik yang melampaui konstruksi negara bangsa. Dalam konteks transnasionalisme di Timur Tengah, jejaring sosial memiliki peran penting untuk membentuk ruang publik. Menurut Habermas, ruang publik merupakan sebuah ruang yang sangat kondusif bagi perkembangan masyarakat. Ruang publik hanya dapat mencapai fungsinya ketika situasi berpendapat yang ideal telah terwujud. Di Timur Tengah, media baru mempertemukan situasi berpendapat antara warga di berbagai negara, yang sebelumnya terbatas akibat

sistem politik yang otoriter. Tidak adanya kontrol yang cukup dari pemerintah terhadap perkembangan media baru mendorong protes- protes massa beralih ke media, terakumulasi di antara gerakan massa yang bersifat nasional dan kemudian menjalar ke tingkat regional.

BAB V PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL DI INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia

Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia dapat diketahui dengan suatu periodisasi tertentu, yakni: (1) Periode pra-1960-an: Pengaruh Indologi; (2) Periode 1960-an: Berkembangnya Teori-Teori Pembangunan; (3) Periode 1970-an: Berkembangnya isu indigenisasi ilmu-ilmu sosial (4) Periode 1980-an: Berkembangnya Gugatan atas Dominasi Positivisme dan Strukturalisme Fungsional (5) Periode 1990-an: Berkembangnya Perspektif Kritis.

Penulisan perkembangan ilmu-ilmu sosial berdasarkan periode tersebut ternyata tak luput dari beberapa kesulitan, antara lain: kelemahan bawaan dari pendekatan periodisasi yang cenderung memotong-motong peristiwa sejarah. Padahal pada kenyataannya sejarah tidak bisa dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kaku dalam tahun-tahun, karena sejarah mengalir dari masa lalu, masa kini dan ke masa depan. Setiap fenomena kesejarahan senantiasa terkait dengan faktor-faktor lain. perkembangan ilmu-ilmu sosial Indonesia memenuhi pola perkembangan biologis, namun pendekatan ini diambil sebagai alat bantu untuk lebih memahami fenomena sejarah perkembangan ilmu-ilmu sosial tanpa harus dibakukan dalam tahun-tahun. Dalam mempelajari ilmu sosial di Indonesia, kita perlu memfokuskan perhatian pada kekuatan (*forces*) dan kecenderungan (*trends*) perkembangan disiplin ilmu ini. Kekuatan menunjuk pada dominasi salah satu atau beberapa tipe disiplin ilmu, sedangkan kecenderungan, erat kaitannya dengan perkembangan signifikan dari kekuatan tersebut. Kekuatan dan kecenderungan selalu berkaitan dalam masyarakat moderen (Beck dan Beck-Gernsheim, 1995). Sebagai contoh, tipe ilmu sosial apa yang paling mendominasi dan bagaimana kecenderungannya di

5
Indonesia. Di masa Orde Baru, perkembangan ilmu sosial ditandai oleh hubungan yang kurang serasi antara ilmu sosial profesional dan ilmu sosial kebijakan disatu pihak dengan ilmu sosial kritis dan ilmu sosial publik di lain pihak. Mayoritas ilmuwan sosial dari universitas dengan kecanggihan metode penelitian dan analisa yang dimilikinya cenderung menggunakan paradigma modernisasi dan teori pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Tidak sedikit ilmuwan sosial profesional ini berkecimpung di lembaga pemerintahan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan ekonomi negara. Di kelompok profesional ini, juga muncul sejumlah ilmuwan sosial publik yang menyuarakan keprihatinan mengenai dampak negatif pembangunan ekonomi. Ilmu sosial kritis dan ilmu sosial publik-organik berkembang di luar universitas. Mayoritas pendukung ilmu ini berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Dipengaruhi oleh paradigma ketergantungan, mereka mempersoalkan dasar-dasar asumsi paradigma modernisasi. Mereka juga bekerjasama dengan kelompok masyarakat melakukan penelitian dan rencana aksi bersama. Disamping itu, mereka juga menerbitkan jurnal dan buku yang membahas persoalan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia (Ganie-Rochman dan Achwan, 2005). Ilmu sosial di masa Orde Baru ditandai oleh perkembangan yang menggairahkan antar tipe-tipe ilmu sosial. Namun, perkembangan ini tidak ditopang oleh hubungan yang erat antar mereka. Akibatnya semua tipe ilmu sosial tidak mengalami penyempurnaan ataupun pembaruan. Era Orde Baru juga ditandai, seperti dilaporkan oleh studi Evers dan Gerke, oleh kecilnya internasionalisasi hasil studi ilmuwan sosial Indonesia. Di masa kini, di era demokrasi, produksi pengetahuan sosial mengalami “booming”. Perusahaan swasta dan organisasi politik dengan tujuan yang berbeda memerlukan jasa lembaga survai pendapat umum. Lembaga donor internasional memerlukan sarjana ilmu sosial untuk melakukan survai guna membantu

pemerintah membangun pemerintahan yang baik. Barangkali sudah ratusan juta dolar Amerika Serikat dikucurkan untuk mendatangkan sarjana ilmu sosial dari luar maupun dalam negeri untuk meneliti, melatih, dan melaksanakan program “Good Governance”.

B. Fase 2 Fase Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia

Dalam konteks sejarah ilmu sosial di Indonesia dapat dilihat dalam tiga fase perkembangan yang berbeda, yaitu fase ilmu sosial kolonial (indologi), fase ilmu sosial developmentalis; dan ilmu sosial kontemporer. Masing-masing fase memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bukan saja karena latar belakang zaman yang berbeda, melainkan juga karakteristik isi dan orientasi keilmuannya (Nasiwan & Wahyuni, 2016: 19).

Pada fase awal, indologie atau ilmu sosial kolonial merupakan corpus pengetahuan yang terlembaga pada mulanya berasal dari kajian indologie, yakni suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Leiden pada tahun 1848 untuk menyiapkan bekal pengetahuan tentang masyarakat tentang masyarakat negeri jajahan bagi calon administrator yang akan dikirim ke Hindia-Belanda. Zeigest (Iklim intelektual) yang melatarbelakangi gagasan tersebut ialah proses pasifikasi daerah jajahan di Hindi-Belanda. Artinya, setelah peperangan dan menaklukan sebagian besar wilayah Indonesia, pemerintah kolonial memerlukan pengetahuan yang mendalam untuk memahami dan menguasai negeri jajahan. Pada awal mula terpisah dari universitas, tetapi sejak tahun 1891 berkembang menjadi salah satu jurusan di Universitas Leiden dan masuk ke Indonesia dengan orientalisme lewat lembaga-lembaga kolonial di luar institusi akademik. Pada tahun 1920-an didirikanlah beberapa dua perguruan tinggi yang terkait langsung dengan ilmu sosial yaitu Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshogeschool, RHS) didirikan 1924 dan fakultas sastra dan filsafat (Fakulteit der Letteren en Wijsbegeerte, FLW) tahun 1940. Ilmuwan sosial pada masa tersebut terutama ilmuwan Belanda

yang mempelajari Indonesia seperti: Snouck Hourgronye, BJO Schrieke, Wertheim, van Vollenhoven, Furnivall, Berg, FDK Bosch, de Graff, dan lain-lain.

Fase kedua yaitu ilmu sosial developmentalis, dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II khususnya sejak tahun 1950-1960-an dimana terjadi pergeseran penting dalam perkembangan ilmu sosial Indonesia dari mainstream sebelumnya (indologie) yang lebih berorientasi Eurosentrisme kepada ilmu sosial baru yang merujuk ke Amerika Serikat (AS). Pergeseran ini terkait dengan zeitgeist dimana terjadi perubahan drastis kondisi politik di Indonesia di satu pihak, dan konstelasi politik dunia. Pertama, untuk ini berhubungan dengan proses dekolonisasi, lewat perang kemerdekaan paska 1945 dan sentimen anti-Belanda yang berujung pada pengusiran semua gurubesar Belanda yang mengajar di perguruan tinggi di Indonesia sejak awal 1950-an. Putusnya hubungan antara Belanda dan Indonesiasejak tahun 1950 ternyata berdampak besar terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Ilmuwan sosial pada masa tersebut sebagian mengenyam pendidikan lewat guru-guru Belanda, untuk tidak mengatakan terdidik secara secara indologies, seperti: Soepomo (hukum), T.G.S. Moelia (Sosiologi), Koentjoroningrat (antropologi) Soekmono (Arkeologi), Sartono Kartodirjo (sejarah), Slamet Imam Santoso (psikologi), Wijoyo Nitisastro (ekonomi), dan lain-lain.

Fase ketiga yaitu ilmu sosial Indonesia kontemporer sebagai kelanjutan dari perkembangan sebelumnya, tetapi pada saat yang sama beberapa ciri pokoknya sebagaimana masih tetap ada dan bertahan bertahan sampai sekarang. Pertengahan tahun 1960-an perkembangan ilmu sosial di Indonesia belum bisa berkembang, baik profesi dan/atau komunitas ilmuan sosialnya, maupun lembaga penelitian dan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang lebih professional. Namun sejak tahun 1970-an, sejalan dengan kembalinya para sarjana ilmu sosial yang belajar di luar negeri

tampaknya terdapat perkembangan yang penting. Perkembangan ilmu sosial pada tahun 1980-an, tingkat dukungan dan minat pemerintah terhadap ilmu sosial di Indonesia melebihi negara mana pun di Asia Tenggara. Hal ini adalah salah satu buah dari terkikisnya tradisi ilmu sosial kolonial alias indologie menjadi ilmu sosial developmentalis. Daldjoeni (1985: 155) menjelaskan mengenai kemajuan-kemajuan di dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial baik mengenai problematik, metodologi maupun pembentukan teorinya. Untuk menilai kemajuan dan kekurangan yang dialami oleh perkembangan tersebut, dapat dipakai titik tolak Mannheim yang mengatakan bahwa tata social akan mengalami keruntuhannya apabila kontrol rasional tak sejajar dengan perkembangan pengetahuan tentang masyarakat. Di samping itu terbukti pula bahwa rasionalitas dan kekuatan moril sebagai bekal pengendalian tak terbagi merata pada kelompok-kelompok social yang ada. Dua macam hal diatas yang dapat mendatangkan keruntuhan.

BAB VI

PENGARUH MODERNISAS TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU SOSIAL

A. ⁴ Modernisasi dan Globalisasi

Sejarah peradaban manusia membuktikan adanya kondisi dinamis dari kehidupan manusia yang tentu berkembang. Perkembangan peradaban manusia dido⁴ng oleh adanya penemuan mesin teknologi dan teknik-teknik produksi yang menyebabkan terjadinya modernisasi dalam berbagai kehidupan manusia. Mesin industri dan teknologi komunikasi terus-menerus dikembangkan karena dukungan perkembangan di dunia ilmu pengetahuan. Peradaban manusia berubah menjadi semakin dinamis, rasional dan modern, melalui, proses yang disebut dengan modernisasi.

Konsep modernisasi sering kali dikaitkan dengan konsep westernisasi. Dalam konteks modernisasi, penggunaan cara-cara budaya Barat maupun barang-barang materi dari Barat merupakan bagian dari proses modernisasi. Selain itu, isu tentang industrialisasi, demokrasi, dan ekonomi pasar menjadi komponen yang muncul bersama-sama dalam proses modernisasi tersebut. Ekonomi pasar yang terjadi pun semakin ke arah kapitalistik yang pada akhirnya mempengaruhi segala kehidupan manusia. Sebagai fenomena sosial, definisi tentang modernisasi banyak kali diberikan oleh para ahli. Koentjaraningrat mendefinisikan modernisasi sebagai usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia yang dilandasi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya bersifat fisik material saja, tetapi lebih jauh dari pada itu, dan dilandasi oleh sikap mental yang mendalam yang maju, berpikir rasional, berjiwa wiraswasta, berorientasi ke masa depan dan seterusnya. Schorl juga memberikan definisi yang tidak jauh berbeda penekanannya, di mana ia mendefinisikan modernisasi sebagai proses penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi ke dalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang masih dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Smith, dimana modernisasi didefinisikan sebagai proses yang dilandasi oleh seperangkat rencana dan kebijakan yang disadari untuk mengubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu. Dengan kata lain, modernisasi mengandung unsur-unsur

1. Perubahan yang bergerak maju secara linier,
2. Adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan,
3. Didukung dengan adanya perkembangan teknologi di berbagai kehidupan manusia, serta
4. Mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia berusaha mengejar kehidupan yang lebih maju dan modern.

Pengaruh modernisasi dalam segi-segi kehidupan manusia cukup besar terutama pengaruhnya terhadap gaya hidup perubahan nilai dan norma, bahkan bentuk relasi sosial dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemajuan peradaban dunia merupakan indikasi kemajuan berpikir umat manusia, sehingga tidak salah apabila disebut bahwa umat manusia dewasa ini telah dihadapkan pada situasi yang serba maju, instan dan pola pemikiran yang kritis. Kemajuan peradaban itu banyak mengakibatkan perubahan di segala aspek kehidupan individu, keluarga, masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dari dunia keilmuan, proses modernisasi di dunia memberikan fokus kajian tersendiri bagi beberapa ahli yang kemudian berusaha mengembangkan teori-teori modernisasi. Arief Budiman (1995:37-38) melihatnya dalam lima varian teori modernisasi yaitu:

1. Teori Harrod Domar, yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal

untuk investasi, dimana teori ini banyak dikembangkan oleh para ekonomi,

2. Teori McClelland yang menekankan pada aspek-aspek psikologi individu, yaitu melalui pendidikan individual kepada anak-anak di lingkungan keluarga, dan pembangunan akan terlaksana apabila terdapat jumlah wiraswasta yang banyak.
3. Teori Weber yang menekankan pada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai dalam masyarakat ini, antara lain melalui agama, mempunyai peran yang menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi proses pembangunan dalam masyarakat dapat terlaksana,
4. Teori Rostow, yang menekankan pada adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan. Lembaga-lembaga politik dan sosial diperlukan untuk menghimpun modal yang besar serta memasok tenaga teknik, tenaga wiraswasta dan teknologi.
5. Teori Inkeles dan Smith yang menekankan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan. Sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang dapat membangun. Teori ini dapat diaplikasikan dengan pemberian pengalaman kerja secara langsung. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif untuk membentuk manusia modern. Modern merupakan simbol kemajuan, pemikiran rasional, cara kerja efisien dan merupakan ciri masyarakat maju.

10

Dampak Positif:

1. Perubahan Tata Nilai dan Sikap

Modernisasi membawa seseorang bisa menghargai dan terbuka terhadap sesuatu yang baru. Maka norma positif mulai terbentuk berdasarkan rencana pengembangan dunia untuk masa depan.

2. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Modernisasi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia bisa merasakan dampak positif modernisasi ketika merasa bahwa pengetahuan dan teknologi baru bisa menunjang kehidupan manusia di kedepannya.

3. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas yang dimaksud di sini adalah keberhasilan modernisasi dalam membawa manusia tepat ke tujuannya. Kelanjutannya, ada efisiensi yang berarti modernisasi memberikan ketepatan, kecermatan, dan kebergunaan.

Dampak Negatif:

1. Westernisasi

Dampak ini terjadi pada negara timur. Mereka yang berkebudayaan timur berusaha mengikuti gaya Eropa dan Amerika (kebarat-baratan). Sejatinya, belum tentu yang diterapkan sesuai dengan mereka yang ingin disebut modern, melihat budaya barunya berasal dari budaya lain.

2. Demoralisasi

Modernisasi terhadap tata nilai dan sikap seseorang ternyata tidak hanya berdampak positif, namun juga bisa negatif. Mereka yang salah mengartikan modernisasi bisa saja mengikuti kebudayaan atau perilaku baru yang sebenarnya tidak tepat di jalankan di tempat tinggalnya.

3. Kesenjangan Sosial Ekonomi

Ini terjadi ketika sebuah daerah kurang terpengaruh modernisasi, sedangkan wilayah lain lebih banyak terpengaruh. Kejadian ini bisa dilihat dari kualitas ekonomi suatu daerah yang kurang fasilitas dengan wilayah lain yang fasilitasnya lebih banyak.

4. Pencemaran Lingkungan

Modernisasi beriringan dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang berdiri. Jika aktifitas industri ini

tidak memahami keadaan alam, maka bisa terjadi potensi pencemaran lingkungan.

B. Perubahan Sosial

Sejauh ini, tidak ada suatu kelompok masyarakat pun yang tak berubah. Perubahan sosial sering dikaitkan dengan beberapa kata lain yang merujuk pada proses sosial yang sama, seperti industrialisasi, modernisasi, dan atau pembangunan. Bahkan didalam berbagai publikasi, kata-kata tersebut dipakai secara bergantian. Dengan kata lain perubahan sosial – perubahan perilaku masyarakat merupakan fungsi manifes dari suatu rekayasa sosial lewat upaya pembangunan yang dilambangkan atau diwujudkan dalam kegiatan industrialisasi menuju suatu masyarakat moderen. Perubahan perilaku itu merupakan salah satu konsekuensi utama dari proses modernisasi yang dialami suatu masyarakat.



Gambar 1.4

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi secara terus menerus, oleh karena itu perubahan sosial merupakan

fenomena yang kompleks yang menembus berbagai tahapan dari kehidupan sosial.

Perubahan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Gillin & Gillin dalam Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

Perubahan sosial itu sendiri terjadi dalam masyarakat, maupun terjadi karena faktor-faktor yang datang dari luar. Kalau dilihat saat ini, terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat kebanyakan datang dari luar masyarakat. Terlebih dilihat dari segi komunikasi dimana dalam hal ini masyarakat didorong untuk menghubungkan apa yang didengar dan apa yang dilihat, apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan, apa yang dilakukan dengan apa yang diperoleh.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, bahwa ada tiga kategori perubahan social yaitu:

1. *Immanent Change*, yang merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar.
2. *Selective Contact Change*; yaitu *outsider* secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggota-anggota dari pada suatu sistem sosial.
3. *Directed Contact Change*; yaitu apabila ide-ide baru atau cara-cara baru tersebut dibawa dengan sengaja oleh *outsider*.

Masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu dalam perwujudannya, senantiasa mengalami perubahan yang dapat berupa kemajuan atau kemunduran, luas atau terbatas, cepat atau lambat. Sebagai suatu sistem, masyarakat terdiri dari sub-sub sistem yang saling berinteraksi dan secara abstrak masyarakat terdiri dari pranata sosial, struktur sosial, sistem nilai, norma, aturan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang mewujudkan kedalam

tatanan konkret sub sistem ekonomi, sub sistem sosial, sub sistem budaya, sub sistem politik, dan sub sistem-sub sistem yang lain baik langsung maupun tidak langsung. Keberadaan sub-sub sistem ini saling memperkuat satu sama lain karena setiap sub sistem itu dengan peranannya dipandang mutlak adanya.

Perubahan sosial pada masyarakat dapat digolongkan pada beberapa pola. Pola yang pertama adalah pola linier. Menurut pola ini masyarakat manusia berkembang mengikuti pola yang pasti. Menurut Comte bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terelakkan. Comte mengemukakan bahwa sejarah memperlihatkan adanya tiga tahap yang dilalui peradaban yaitu tahap Teologis dan militer, tahap metafisik dan Yuridis, dan tahap Ilmu Pengetahuan dan Industri. Pola yang kedua adalah pola linier yang mengemukakan bahwa masyarakat berkembang laksana roda, kadang naik ke atas dan kadang turun ke bawah.

Dewasa ini agak sulit untuk menentukan apakah suatu masyarakat berkembang melalui tahap-tahap tertentu, karena sangat sukar untuk menentukan apakah tahap yang telah dicapai dewasa ini merupakan tahap terakhir. Sebaliknya juga sulit untuk menentukan ke arah mana masyarakat akan berkembang, apakah pasti akan menuju ke bentuk kehidupan sosial yang sempurna apabila dibandingkan dengan keadaan dewasa ini, atau mungkin sebaliknya?

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tidak bisa berjalan dengan sendiri tanpa adanya pengaruh dari bidang yang lain. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan:

1. Kontak dengan kebudayaan lain.
2. Sistem pendidikan formal yang maju.
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.
4. Toleransi terhadap perubahan-perubahan yang menyimpang

(*deviation*), yang bukan merupakan delik.

5. Sistem terbuka lapisan masyarakat.
6. Penduduk yang heterogen.
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
8. Orientasi ke masa depan.

C. Modernisasi dalam Perspektif Perubahan Sosial

Kehidupan masyarakat senantiasa berubah seiring perkembangan zaman, dan perubahan yang terjadi tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan yang terjadi pun beragam bentuknya, mulai dari perubahan positif yakni meninggalkan kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik dan perubahan negatif yakni meninggalkan kebiasaan baik menuju kehidupan yang kurang baik. Sama halnya dengan proses modernisasi. Modernisasi pada masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lain baik pada prosesnya maupun hasilnya, tergantung dari keinginan dan kebutuhan dari masyarakatnya. Perubahan yang terjadi karena proses modernisasi akan membelenggu masyarakat pada budaya konsumtif, hedonisme, dan lain sebagainya.

Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tansisional menuju masyarakat yang maju mengikuti perkembangan masyarakat yang lainnya yang dianggap lebih dahulu maju. Masyarakat pun harus cerdas dalam memilih mana dari proses modernisasi tersebut yang akan dapat merubah masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga manfaat dari modernisasi tersebut dapat dirasakan.



Gambar 1.5

Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jika masyarakat mau berubah dan menerima modernisasi yang sedang melanda dunia ini, maka mau tidak mau masyarakat pasti akan berubah, dan diharapkan perubahan itu membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Walaupun kadang-kadang ada pertentangan diantara warga masyarakat sehingga akan menyulitkan terhadap proses perubahan yang mungkin sudah direncanakan.

Terdapat 4 alasan mengapa komitmen terhadap modernisasi yang mungkin nantinya akan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat sulit dicapai:

1. Setiap perubahan yang akan mengancam hubungan antarpribadi lama mungkin akan ditentang.
2. Karena rakyat biasanya dituntut mengorbankan kepentingan pribadi demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dengan kata lain, komitmen mereka mungkin lebih tertuju bagi kepentingan diri sendiri ketimbang memikirkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
3. Rakyat mungkin dituntut mengerjakan tugas-tugas yang karena satu dan lain hal menimbulkan ketegangan psikis.

4. Karena pemimpin yang menuntut rakyatnya berkorban itu kurang menunjukkan tanda-tanda berkorban.

12

Modernisasi menimbulkan perubahan dalam bidang demografi, sistem stratifikasi, pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai, sikap serta kepribadian. Perubahan demografis khas yang terjadi bersamaan dengan upaya modernisasi, mencakup pertumbuhan penduduk (tingkat kematian menurun), dan urbanisasi.

Berbagai perubahan sistem stratifikasi telah terjadi pula selama proses modernisasi. Tumin melukiskan 9 jenis perubahan sistem stratifikasi sosial ketika masyarakat menuju industrialisasi.

1. Pembagian kerja menjadi semakin rumit, bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi.
2. Status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan atas asal usul (*ascription*).
3. Alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi menjadi perhatian utama.
4. Peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, artinya pekerjaan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ganjaran ketimbang sebagai ganjaran itu sendiri.
5. Ganjaran yang tersedia untuk didistribusikan meningkat.
6. Ganjaran didistribusikan atas dasar yang agak lebih adil.
7. Terjadinya pergeseran dalam peluang hidup didalam strata sosial.
8. Terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial.
9. Pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam distribusi kekuasaan.

Selama proses modernisasi kelas menengah ke atas berkembang. Perluasan ini disebabkan perubahan struktur pekerjaan dan ini berarti terdapatnya tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Berarti proses perkembangan itu berlangsung dengan

sendirinya karena kelas menengah secara khas lebih berorientasi pada perubahan dibanding kelas bawah, setidaknya terhadap jenis perubahan yang tercakup dalam modernisasi.

Perubahan pendidikan secara kualitatif disebabkan karena pembagian kerja yang semakin rumit dalam masyarakat yang memodernisir diri memerlukan sistem pendidikan formal untuk menyiapkan orang memegang jabatan mereka, sedangkan sistem pemegangan dirasakan telah kolot, lambat, dan janggal. Dengan kata lain, pendidikan digiring untuk mempersiapkan individu melaksanakan fungsinya didalam struktur sosial yang baru. Berarti perubahan di bidang pendidikan iitu penting bagi proses modernisasi, karena pendidikan merupakan bagian integral pembangunan ekonomi bangsa, dan juga penting bagi pembangunan manusia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhammad Uyun, M. Si & Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., 2021, Psikologi Pendidikan, Deepublish.
- Fredian Tonny Nasdian, 2015, Sosiologi Umum, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Maman Abdurrahman, 1987. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Calvary.
- Munandar Solaiman M. 1989. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco.
- Astawa, Ida Bagus Made. 2017. *Pengantar Ilmu Sosial*: Raja Grafindo Persada.
- Harwatiyoko & Neltje F. Kaltuuk. *MKDU ILMU SOSIAL DASAR*, Jakarta: 1996
- Somantri, Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosdakarya.
- Sumaatmadja, Nursid. 1986. *Pengantar Studi Sosial*. Bandung: Alumni
- Nico Schulte Nordholt & Leontine Visser, Ed, 1997. *Pengantar Ilmu-Ilmu Sosial Di Asia Tenggara dari Partikularisme ke Universalisme*.
- Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam*. Jilid. 2, terj. Khairon Nahdhiyin (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Hitti, Philip K, *History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Marglin, Stephen A.; Schor, Juliet B. (1992). "Zaman keemasan kapitalisme: Menafsirkan kembali pengalaman pascaperang. *Pers Universitas Oxford*." Cambridge: univ. harvad
- Hays, Jeffrey (Agustus 2012). "Sejarah Ekonomi Jepang pada 1970-an dan 80-an". Bandung:

- Sudrajat, Nugraheni C.P; Yunike, S.; & Dwi S., A., *Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Pembaruan Pembelajaran IPS Terpadu Di Sekolah*, Jipsindo vol. 7 no. 1, 2020.
- Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dewi Wulansari, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditama.
- Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Robert H. Lauer, 1993, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Melvin M. Tumun, *Competing Status systems dalam Labor Commitment and Social Change*, ed. Moore and Feldman.

BIODATA PENULIS

Penulis 1

Nama : Aref Irawan
Nim : 190105032
TTL : Mataram/ 29 Januari 2001
Alamat : Kelurahan Pejeruk, Kec. Ampenan
Hobi : Sepak Bola

Penulis 2

Nama : Adrian Maulana
Nim : 190105005
TTL : Dasan Tebu/ 4 Juni 2001
Alamat : Dasan Tebu, Desa Ombe Baru, Kec. Kediri
Hobi : Nonton film

Penulis 3

Nama : Abdul Majid
Nim : 190105009
TTL : Tembelok/ 5 April 2001
Alamat : Lingkungan Tembelok, Kota Mataram
Hobi : Coding

Penulis 4

Nama : Sahman Hadi
Nim : 190105022
TTL : Mataram/ 6 September 2000
Alamat : Gegutu Timur, Kota Mataram
Hobi : Sepak bola

perkembangan ilmu sosial

ORIGINALITY REPORT

52%

SIMILARITY INDEX

52%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	19%
2	journal.uny.ac.id Internet Source	7%
3	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	5%
4	es.slideshare.net Internet Source	5%
5	id.123dok.com Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	2%
7	www.paradigma.eu.org Internet Source	2%
8	miftahul-syifa.blogspot.com Internet Source	2%
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
10	toptenid.com Internet Source	2%
11	pdfcoffee.com Internet Source	2%
12	dinamikasosial.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On